



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DPRD**



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

ALAMAT

Jalan Raya Praya Kopang, (0370) 655075
Jontlak - Lombok Tengah

NOMOR TELEPON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang telah disusun dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Adapun Rencana Kerja ini menggambarkan arah kebijakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini secara umum adalah melaporkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu tolok ukur pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah. Laporan ini memuat secara rinci dan lengkap pencapaian kinerja suatu instansi terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan/sasaran, kebijakan dan program yang disusun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Praya, Oktober 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos, MH
NIP.197405151997031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Tabel.	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023 ..	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	37
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	37
3.3. Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah.....	12
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah	30
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah	36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah	39
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021—2026. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025—2030 yang mendukung Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025—2030.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD Tahun 2025—2030 Kabupaten Lombok Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
2. Mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program inovatif yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mewujudkan sinergitas. efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan 2 program dan 13 kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan-kegiatan pokok yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan telah pula diselesaikan sesuai dengan jadwal. Tak terkecuali kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan tersebut di atas. Realisasi anggaran dan capaian target dari masing-masing kegiatan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Tidak adanya kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target yang direncanakan adalah:

1) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran dalam membahas kebijakan anggaran. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 672,772,444 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen kebijakan anggaran dengan target sebanyak 5 dokumen terdiri dari :

Dokumen Hasil pembahasan KUA dan PPAS = 1 Dokumen

Dokumen Hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan = 1 Dokumen

Dokumen hasil pembahasan APBD = 1 Dokumen

Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan = 1 Dokumen

Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD = 1 Dokumen

Outcome : Persentase kebijakan anggaran dibahas tepat waktu

Realisasi : Keuangan = Rp. 547,378,900 (81.36%)

Fisik = 5 buah dokumen atau sebesar 100%.

2) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan pengawasan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD atas kinerja Pemerintah Daerah. Tugas pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD selain fungsi *budgeting* dan fungsi legislasi. Pengawasan dilakukan oleh Komisi berdasarkan *leading sector* masing-masing Komisi, baik dengan melakukan dengar pendapat dengan memanggil SKPD terkait di Ruang Rapat DPRD maupun melakukan peninjauan lapangan. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 176,089,145 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen hasil pengawasan DPRD dengan target sebanyak 6 dokumen terdiri dari :

Dokumen pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	= 1 Dokumen
Dokumen pengawasan bidang Infrastruktur	= 1 Dokumen
Dokumen pengawasan bidang Kesra	= 1 Dokumen
Dokumen pengawasan bidang Ekonomi	= 1 Dokumen
Dokumen Pengawasan Tindak LHP oleh BPK	= 1 Dokumen
Dokumen hasil Pembahasan LKPJ	= 1 Dokumen

Outcome : Persentase pelaksanaan pengawasan

Realisasi : Keuangan = Rp. 143,479,100 (81.48%)

Fisik = 6 buah dokumen atau sebesar (100%).

3) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ini dimaksudkan untuk membiayai Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mengikuti bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar wawasan dan pengetahuannya lebih berkembang dalam rangka memahami persoalan yang berkembang ditengah Masyarakat dan publikasi kegiatan/agenda DPRD agar tersebar luas ditengah masyarakat. Adapun sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman anggota DPRD sebagai bekal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pemahaman yang luas dari anggota DPRD akan berdampak terhadap kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.1,453,598,150 dengan capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Hasil Pendalaman Tugas sebanyak 4 dokumen

Outcome : Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek di atas 20 jam

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 1,374,733,632 (94.57%)

Fisik = 4 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas (100%)

b) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Sub Kegiatan Publikasi dan dokumentasi dewan ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Bagian Humas dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai. Adapun medium penyebarluasan agenda dan hasil dan hasil kerja DPRD tersebut adalah media massa seperti koran nasional, koran lokal, media elektronik (radio dan TV) dan media online. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 2,868,721,576 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	= 530 Dokumen
Outcome	: Persentase Penyebarluasan Publikasi dan Dokumentasi DPRD tepat waktu	
Realisasi	: Keuangan sebesar Rp 2,851,902,926 (99.41%)	
Fisik	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	= 530 Dokumen (100%)

4) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Adapun Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat memiliki anggaran sebesar Rp. 6,070,602,827 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6,009,715,690 (99.00%) dan realisasi fisik sebesar (100%) yang terdiri dari:

a) Pelaksanaan Reses

Kegiatan Reses ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan dan kendala dalam proses pembangunan daerah. Untuk Tahun 2024 kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 2 (tiga) kali, dengan rincian reses 1 (satu) kali reses dilaksanakan oleh anggota DPRD periode 2019-2024 dan 1 (satu) kali reses dilaksanakan oleh anggota DPRD periode 2024-2029. Pelaksanaan kegiatan reses dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Tengah dengan mengundang konstituen untuk melakukan audiensi di tempat-tempat pertemuan informal seperti di Masjid, Aula Kantor Desa, Aula Pondok Pesantren maupun rumah tokoh masyarakat/Kepala Dusun. Adapun pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Output	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses sebanyak 2 dokumen
Outcome	: Persentase Anggota DPRD yang menyampaikan aspirasi tepat waktu
Realisasi	: Fisik = 2 dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (100 %)

b) Hearing atau dengar pendapat

Kegiatan Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat/ LSM serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang menyampaikan aduan atau aspirasi terhadap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2024. Hearing/ rapat dengar pendapat umum telah dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rincian 12 (dua belas) kali dilaksanakan oleh anggota DPRD periode 2019-2024 dan 5 (lima) kali dilaksanakan oleh anggota DPRD periode 2024-2029.

5) Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD

Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tugas-tugas DPRD dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2,725,385,803 dengan realisasi Rp. 2,697,096,195 atau (98.96%) serta memiliki target fisik 29 Dokumen, sedangkan realisasinya adalah 29 dokumen atau (100%).

Adapun sub kegiatan dari kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Laporan Kinerja DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun anggaran. Adapun capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Laporan Kinerja DPRD sebanyak 1 dokumen
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu
Realisasi : Fisik = 1 Dokumen Laporan Kinerja DPRD (100%)

b) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Sub Kegiatan fasilitas pelaksanaan tugas Badan Musyawarah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat Badan Musyawarah dalam merumuskan jadwal kegiatan DPRD selama satu periode/masa tertentu. Adapun capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah sebanyak 8 dokumen
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu
Realisasi : Fisik = 8 Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (100%)

c) Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD

Sub Kegiatan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat internal antar Pimpinan DPRD dan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD lainnya. Adapun capaian terhadap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Output : Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebanyak 12 dokumen
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu
Realisasi : Fisik = 12 Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (100%)

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ini dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Kegiatan ini berupa kunjungan kerja dalam rangka konsultasi ke Kementerian dan studi banding ke berbagai daerah. Adapun capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebanyak 4 dokumen
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu
Realisasi : Fisik = 4 Dokumen Hasil koordinasi DPRD (100%)

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan kegiatan yang melebihi target yang direncanakan adalah:

1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD atau alat kelengkapan DPRD lainnya selama tahun 2024. baik berupa Ranperda Inisiatif DPRD maupun Ranperda Usul Pemerintah.

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3,687,003,764 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas dengan target (70%) terdiri dari :
Peraturan DPRD yang dibahas = 2 Buah
Ranperda yang dibahas = 6 Buah
Sehingga berjumlah = 8 Buah
Outcome : Persentase Perda yang ditetapkan

Realisasi : Keuangan = Rp. 3,487,083,698 (94.58%)
Fisik = 22 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atau sebesar (275%)

Adapun Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas adalah:

- Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- Ranperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Ranperda tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Ranperda tentang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Tojong Ojong Kecamatan Batukliang;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Monggas Bersatu Kecamatan Kopang;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Peseng Kecamatan Kopang;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Batu Asak Kecamatan Praya Barat;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Jangkik Jawe Kecamatan Praya Barat;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Masjuring Kecamatan Praya Barat;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Mentokok Kecamatan Praya Barat;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Dahe Kecamatan Praya Timur;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Embung Puntik Kecamatan Praya Timur;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Kidang Baru Kecamatan Praya Timur;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Semudane Kecamatan Praya Timur;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Awang Kecamatan Pujut;
- Ranperda tentang Pembentukan Desa Nandus Kecamatan Pujut;
- Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045;
- Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Peraturan Tata Tertib DPRD

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Adapun Faktor-faktor yang menjadi penyebab, terpenuhinya atau melebihi target kinerja kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pembahasan Ranperda tentang pembentukan Desa sejumlah 14 Ranperda pada prinsipnya memiliki substansi yang sama, sehingga

pembahasannya dilakukan secara simultan. Pembahasan Ranperda ini tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak mengganggu jadwal kegiatan DPRD

2. Tersedianya jadwal kegiatan yang jelas dengan dedline waktu yang tegas sehingga tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan;
3. Jadwal kegiatan adalah hasil musyawarah dari berbagai elemen fraksi DPRD, karena penentuan jadwal tersebut aspiratif, maka DPRD termotivasi untuk menuntaskannya;
4. Disiplin dan komitmen yang tinggi baik pimpinan maupun anggota DPRD dalam menuntaskan agenda kerja sudah terjadwal;
5. Kesiapan sarana dan prasarana dan personal seKretariat DPRD dalam memfasilitasi seluruh agenda DPRD

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Terbahasnya Perda pembentukan desa sejumlah 14 Perda dapat menjadi dasar pembentukan 14 desa baru yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD baik melalui forum interaksi sosial antar DPRD dengan masyarakat seperti dalam pelaksanaan Reses maupun forum resmi seperti hearing dan dialog di kantor DPRD.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Sekretariat DPRD melakukan peninjauan kembali terhadap penentuan target kegiatan-kegiatan agar lebih rasional sesuai fakta sehingga berdampak pada penyesuaian besaran anggaran. Penyesuaian target ini memerlukan pembahasan yang mendalam terkait dengan agenda seluruh rapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhitungkan aspek urgensi dan prioritas.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 02	SEKRETARIAT DPRD									
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	CC	B	B	100	B	B	100
4 02 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	2	2	100
4 02 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	-	-	-	1	1	100
4 02 01 2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	-	-	-	1	1	100
4 02 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16	16	16	100	16	16	100
4 02 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan hasil Pemeriksaan OPD	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	55	55	100	45	45	100
4 02 01 2.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
4 02 01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	2	2	100	2	2	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	13	13	100	16	16	100
4 02 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	50	50	100	50	50	100
4 02 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	2	100
4 02 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6	6	6	100	7	7	100
4 02 01 2.06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	100	-	-	-

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	66	66	66	66	100	55	55	100
4 02 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	11	11	11	100	11	11	100
4 02 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Validasi data aset OPD	-	-	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.07 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	1	1	100	-	-	-
4 02 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
4 02 01 2.02 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	31	31	31	100	26	26	100
4 02 01 2.09 05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	25	25	100	39	39	100
4 02 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	3	100
4 02 01 2.09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.15 01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	50	50	100	50	50	100
4 02 01 2.15 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	2	5	5	100	4	4	100
4 02 01 2.15 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	50	50	50	100	50	0	0

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase rapat yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.16 02	Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	9	9	9	9	100	10	10	100
4 02 01 2.16 03	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	130	114	130	130	100	86	86	100
4 02 01 2.16 04	Sub Kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	75	50	67,50	67,50	100	70	100	148
4 02 02 2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	75	50	67,50	67,50	100	70	100	148
4 02 02 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	6	12	12	100	12	12	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.01 04	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	3	4	4	100	4	4	100
4 02 02 2.01 05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	-	-	-	-	1	1	100
4 02 02 2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100	-	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.02 01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	1	1	100	1	1	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.03 01	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 02	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 03	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 04	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 06	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	100	100	100	100	100	100	100	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.04 01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	-	-	-	-	1	1	100
4 02 02 2.04 02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	6	6	100	4	4	100
4 02 02 2.04 03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510	525	510	510	100	530	530	100
4 02 02 2.04 04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	10	10	10	100	10	10	100
4 02 02 2.04 05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	9	9	9	100	9	9	100
4 02 02 2.04 06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.04 07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.05 01	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	3	3	3	300	2	2	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.05 02	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.05 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	38	30	46	28	60,86	2	2	100
4 02 02 2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan	Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.06 02	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.07	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.07 01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.07 02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.08 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	3	1	1	100	4	4	100

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.08 02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.08 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	13	8	8	100	8	8	100
4 02 02 2.08 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	5	12	12	100	12	12	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

a. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sesuai Renstra Tahun 2021—2026 adalah Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD. Untuk mengukur Capaian Kinerja 2024, dilakukan survei terhadap 50 anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai sampel/responden dari 50 orang populasi.

Analisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan layanan administratif Sekretariat DPRD. Teknik analisa data yang digunakan mencakup statistik deskriptif. Teknik analisis indeks kepuasan.

Untuk melihat gambaran umum subjek penelitian dilakukan perhitungan persentase rata-rata (*mean*) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subjek melalui statistik deskriptif. Analisa data dari variable-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administratif Sekretariat DPRD dilakukan dengan statistik deskriptif.

Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert dengan rentang 1 sampai dengan 5 (*skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas. 2 = Tidak Puas. 3 = Kurang Puas. 4 = Puas. dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas*). Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Perhitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

Dimana:

T = jumlah responden

$$P_n = \text{skor } 1.2.3.4.5$$

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Sangat Puas” dikalikan 5
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Puas” dikalikan 4
3. KP (Kurang Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Kurang Puas” dikalikan 3
4. TP (Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Tidak Puas” dikalikan 2
5. STP (Sangat Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Sangat Tidak Puas” dikalikan 1

Selanjutnya semua hasil 1—5 dijumlahkan menjadi Total Skor. Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$$

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RUMUS INDEKS \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Contoh perhitungan :

Perhitungan untuk interpretasi kriteria kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan.

1. SP	=	2 x 5	=	10
2. P	=	34 x 4	=	136
3. KP	=	6 x 3	=	18
4. TP	=	2 x 2	=	4
5. STP	=	0 x 1	=	0
Total Skor			=	168

$$\begin{aligned}
 Y &= \text{Skor Tertinggi} = \text{Nilai tertinggi likert} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 44 = 220 \\
 \text{RUMUS INDEKS} &= \frac{168}{220} \times 100 \\
 &= 76.36 \%
 \end{aligned}$$

Untuk mencari interval skor persen guna menentukan rentang kriteria menggunakan rumus:

$$I = \frac{100}{\text{rentang}} = \frac{100}{5} = 20$$

Jumlah Skor Likert	5
--------------------	---

Jadi 20 adalah interval jarak dari skor terendah 0% hingga 100%. Berikut rentang kriteria interpretasi skor berdasarkan interval:

- Angka 0% - 19.99% = Sangat Tidak Puas
- Angka 20% - 39.99% = Tidak Puas
- Angka 40% - 59.99% = Kurang Puas
- Angka 60% - 79.99% = Puas
- Angka 80% - 100% = Sangat Puas

Berdasarkan Laporan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD Tahun 2024 dengan melakukan survei atas persepsi dan pendapat Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD pada masing-masing Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung agenda kerja DPRD. Dengan menggunakan formulasi tersebut di atas, maka akan diperoleh hasil perhitungan masing-masing Bagian sebagai berikut :

Bagian	Total Skor
Bagian Persidangan	176,20
Bagian Umum	172,60
Bagian Humas	172,40
Bagian Keuangan	175,50
TOTAL SKOR	174,20

Total Skor	=	174,20
Y	=	5 x 46 orang
	=	230

Indeks Kepuasan	=	$\frac{174,20}{230} \times 100\% = 75,74\%$
-----------------	---	---

Nilai Peringkat Kinerja : **PUAS**

b. Kendala dan Hambatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja dan memfasilitasi kegiatan DPRD masih ditemui berbagai kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Faktor internal;

Kurang tersedianya anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh pembahasan Ranperda yang sudah ditetapkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banpemperda) sebagaimana yang termuat di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), termasuk penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda, sehingga penyusunan rencana kerja DPRD tidak maksimal. Ada dua sumber usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan kepada DPRD untuk dibahas yaitu, Ranperda Usul Pemerintah dan Ranperda Usul DPRD.

2. Faktor eksternal;

Ranperda yang sudah dibahas oleh DPRD belum dapat ditetapkan sebelum dilakukan harmonisasi di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTB dan evaluasi oleh Gubernur NTB. Dalam proses harmonisasi dan evaluasi tersebut sering kali mengalami keterlambatan karena tidak ada batas waktu yang pasti yang menjadi batas akhir penetapan Ranperda sehingga Ranperda yang kita ajukan untuk harmonisasi menggantung cukup lama di Kanwil Hukum dan Ham dan Gubernur provinsi NTB.

c. Solusi

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut di atas adalah:

1. Mengusulkan tambahan anggaran kepada TAPD untuk memfasilitasi kegiatan Ranperda sesuai dengan jumlah Ranperda yang akan dibahas sebagaimana tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait guna percepatan proses harmonisasi dan evaluasi Ranperda yang telah dibahas tersebut.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD merupakan salah satu tujuan dari Sekretariat DPRD dan menjadi barometer bagi tercapainya keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Namun, dinamika yang masif menuntut pelayanan kepada Anggota DPRD menjadi lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kepada Anggota DPRD akan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik, karena Tujuan akhir dari pelayanan dan fasilitasi tersebut adalah peningkatan kinerja DPRD yang dapat dicapai diantaranya dengan menyediakan dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut otomatis juga dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mau tidak mau

harus adaptif dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi baik itu teknologi terapan maupun teknologi informasi bermanfaat untuk :

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Penyebarluasan informasi tentang aktifitas DPRD dapat disampaikan secara massif kepada masyarakat. Informasi tentang agenda dan produk DPRD tersebut dapat disediakan melalui website DPRD 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke Sekretariat DPRD.

2. Peningkatan hubungan antara lembaga DPRD dengan masyarakat umum

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara DPRD selaku wakil rakyat dengan konstituen atau masyarakat secara luas menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dari banyak pihak.

3. Kemudahan dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD

- a. Penggunaan teknologi berupa perangkat elektronik yang menjadi media penerima dan penyimpan seperti Tablet atau sejenisnya perlu dimiliki oleh semua Anggota DPRD sebagai fasilitas dalam mempermudah pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, seperti menerima surat undangan Rapat Paripurna. Hal ini penting untuk efektifitas dan efisiensi kinerja DPRD. Saat ini pada setiap agenda rapat paripurna DPRD, Sekretariat DPRD harus menyampaikan undangan kepada masing-masing anggota DPRD untuk menghadiri rapat tersebut secara manual. Terkadang penyampaian surat tersebut tidak dapat dilakukan di Kantor, melainkan harus diantar sampai dengan domisili/ alamat anggota DPRD tersebut, hal ini sering muncul kendala dalam proses penyampaiannya antara lain, karena cuaca, hujan dll.
- b. Penggunaan aplikasi pencarian perundang-undangan sebagai media yang menyajikan seluruh produk perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah pusat baik berupa UU, PP, Inpres dll. Aplikasi ini sangat diperlukan karena dalam pembahasan produk perundang-undangan, Anggota DPRD perlu didukung dengan produk hukum di atasnya yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yang sedang dibahas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disharmonisasi antara produk hukum daerah dengan produk hukum pusat. Teknologi ini memungkinkan pihak Sekretariat DPRD dapat menyajikan Regulasi (produk perundang-undangan) yang dimaksud dengan cara cepat dan tepat.

- c. Penggunaan teknologi *translater from Voice to letter*, untuk mempermudah pembuatan notulen rapat. Alat ini secara otomatis akan menerjemahkan suara ke dalam bentuk tulisan secara otomatis selama rapat berlangsung, Hal ini dapat mempercepat proses notulensi setiap rapat.

Tuntutan DPRD akan fasilitasi yang semakin profesional sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur Sekretariat DPRD. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan administrasi melalui pemanfaatan sistem informasi untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan anggota DPRD.

Dalam sektor pemerintah secara umum, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
2026 Kabupaten Lombok Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Lombok Tengah	- Persentase Penetapan Ranperda Tahun N - Ketepatan Penetapan Perda APBD - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	55 Tepat/tida k tepat 100	10.614.075.797	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Lombok Tengah	- Persentase Penetapan Ranperda Tahun N - Ketepatan Penetapan Perda APBD - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	55 Tepat/tida k tepat 100	7.383.054.988	
1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	6	1,115,007,527.00	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	6	153.044.226	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	13,154,920.00	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	13.402.164	
1.2	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11	899,902,607.00	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11	86.642.062	
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	201,950,000.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	53.000.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1.4	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	-	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	
2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100	314,400,714.00	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100	173.801.740,00	
2.1	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	35,272,055.00	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	34.924.300,00	
2.2	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	34,868,703.00	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	34.636.380,00	
2.3	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	159,971,252.00	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	34.882.732,00	
2.4	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	49,260,352.00	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	34.579.948,00	
2.5	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	35,028,352.00	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	34.778.380,00	
3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan pengawasan	100	205,073,673.00	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan pengawasan	100	160.454.096,00	
3.1	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	23,627,678.00	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	36.528.165,00	
3.2	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	23,643,272.00	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	23.577.165,00	
3.3	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan	Kab. Lombok	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	1	23,696,272.00	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Kab. Lombok	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	1	23.535.165,00	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tengah	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Kesejahteraan Rakyat	Tengah	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
3.4	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	23,700,433.00	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	23.581.165,00	
3.5	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	18,057,919.00	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	18.024.000,00	
3.6	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	92,348,099.00	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	35.208.436,00	
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	100	2,378,378,499.00	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	100	925.780.793,00	
4.1	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	
4.2	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	517,646,150.00	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	49.673.365,00	
4.3	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510	1,122,657,914.00	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510	628.282.181,00	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	410,400,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24	30.000,00	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	324,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	243.000.000,00	
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	-	
4.7	Sub Kegiatan Penyusunan Program	Kab. Lombok	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	3.674.435.00	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Lombok	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	4.795.247,00	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kerja DPRD	Tengah					Tengah				
5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu	100	6,095,585,581.00	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu	100	5.918.381.165,00	
5.1	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	42,615,136.00	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	42.864.056,00	
5.2	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	12,567,840.00	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	12.802.814,00	
5.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	40	6,040,402,605.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	5.862.714.295,00	
6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100	7.920.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	-	-	
6.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kode Etik DPRD	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kode Etik DPRD	-	-	
6.2	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Pengawasan Kode Etik	-	0	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Pengawasan Kode Etik	-	-	
7	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	-	0	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	-	-	
7.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kerjasama Daerah	-	0	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kerjasama Daerah	-	-	
7.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Lombok Tengah	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi	-	0	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Lombok Tengah	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi	-	-	
8	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	505,629,803.00	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	51.592.968,00	
8.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8	462,076,526.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	6.489.795,00	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
8.2	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	7,398,302.00	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	7.999.114,00	
8.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	31,331,028.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	31.686.813,00	
8.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	4,823,947.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9	5.417.246,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2026. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan 2 program dan 14 kegiatan termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

2.5.1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

2.5.2. Kegiatan

1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
8. Layanan Administrasi DPRD;
9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peningkatan Kapasitas DPRD;
13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
14. Fasilitasi Tugas DPRD.

2.5.3. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
19. Penyediaan Bahan /Material;
20. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
22. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
23. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
29. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
30. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
31. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
32. Fasilitasi Fraksi DPRD;
33. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
34. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
35. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
36. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
37. Pembahasan KUA dan PPAS;
38. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
39. Pembahasan APBD;
40. Pembahasan APBD Perubahan;
41. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
42. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
43. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
44. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
45. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;

46. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
47. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
48. Pendalaman Tugas DPRD/Bimtek DPRD;
49. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
50. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
51. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
52. Penyusunan Program Kerja DPRD;
53. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
54. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
55. Pelaksanaan Reses;
56. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
57. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
58. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
59. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah**

No	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Lombok Tengah saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2025—2030, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYASAING, SEJAHTERA dan HARMONIS (MASMIRAH)”**.

Di sisi lain sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terjadinya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah dengan memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dibangun berdasarkan 4 (empat) Pilar Kebijakan Pembangunan yaitu :

1. Pembangunan yang berorientasi pada kemiskinan (*pro poor*);
2. Pembangunan yang berorientasi pada perluasan ketenagakerjaan (*pro job*);
3. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
4. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup (*Pro environmental*).

Keempat pilar kebijakan pembangunan nasional itu harus didukung dan diperkuat dengan program dan kebijakan daerah yang searah dan sebangun sehingga tercapai sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Peran pemerintah daerah yaitu eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan arah kebijakan nasional tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan

menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Oleh karena itu dalam tujuan rumusan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan secara lebih operasional untuk menentukan misi dengan memperhatikan isu strategis daerah yang disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun;
2. Harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan pokok fungsi organisasi;
4. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama satu tahun;
5. Tujuan organisasi mewakili tujuan umum seluruh unit kerja;
6. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dimaksud.

Berdasarkan makna tujuan organisasi tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan misinya telah menentukan tujuan yaitu **“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”**.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepada DPRD”**

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepada DPRD	Persentase Layanan Administrasi Kepada DPRD	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah. pada tahun 2026 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan 2 program dan 14 kegiatan. termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;

3.3.2. Kegiatan

1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
8. Layanan Administrasi DPRD;
9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peningkatan Kapasitas DPRD;
13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

14. Fasilitasi Tugas DPRD.

3.3.3. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
19. Penyediaan Bahan /Material;
20. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
22. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
23. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

29. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
30. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
31. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
32. Fasilitas Fraksi DPRD;
33. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
34. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
35. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
36. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
37. Pembahasan KUA dan PPAS;
38. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
39. Pembahasan APBD;
40. Pembahasan APBD Perubahan;
41. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
42. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
43. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
44. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
45. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
46. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;
47. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
48. Pendalaman Tugas DPRD/Bimtek DPRD;
49. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
50. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
51. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
52. Penyusunan Program Kerja DPRD;
53. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
54. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
55. Pelaksanaan Reses;
56. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
57. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
58. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
59. Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Sekretariat DPRD						44.148.206.018						62.150.004.000			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						44.148.206.018							62.150.004.000		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						44.148.206.018							62.150.004.000		
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	-			100 Persentase	36.765.151.030						-	45.317.885.000		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	-			22 Dokumen	124.094.442			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD	-	176.485.000		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.876.011	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		28.367.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.786.762	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		16.752.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14.696.922	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		11.564.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.692.900	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		7.773.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.803.394	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		8.185.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	14.217.248	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		6.788.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	11.930.436	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifPenguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		19.715.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	24.090.769	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		77.341.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	-		19 Dokumen	4.890.341.913			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD	-	5.390.863.000	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50/14 Orang/bulan	4.816.618.172	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		5.296.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	25.595.180	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		45.973.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.331.230	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		8.895.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	37.797.331	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		39.495.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	-			12 Laporan	684.698.030			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD	-	3.201.557.000	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	102.361.717	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		112.478.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.410.820	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		1.302.290.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	96.152.682	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		165.547.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	53.327.640	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		465.846.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	52.303.760	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		54.048.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	263.400.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		303.400.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				55 Laporan	49.900.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretari at DPRD		161.810.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	51.798.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		572.206.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	11.043.411	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		63.932.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			1 Unit	120.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD	-	0	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifPenguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		0	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	45.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretari at DPRD		0	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretari at DPRD		0	SEKRETARIAT DPRD	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan	-			12 Bulan	2.029.292.144			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD	-	2.280.507.000	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	533.979.728	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretari at DPRD		587.378.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.495.312.416	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretari at DPRD		1.693.129.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD kondisi baik	-			87 Unit	437.542.874			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretari at DPRD	-	2.719.081.000	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	180.212.980	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Sekretari at DPRD		301.954.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	103.600.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	153.729.894	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	Sekretariat DPRD		2.217.127.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	-		12 Laporan	28.160.699.262			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD	-	31.247.579.000	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50/12 Orang/Bulan	27.918.000.722	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD		30.874.801.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				104 Paket	225.198.540	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD		355.278.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	17.500.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD		17.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Laporan layanan administrasi DPRD	-		58 Dokumen	438.362.365			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	301.813.000	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				9 Laporan	35.670.410	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		39.201.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				49 Laporan	212.941.955	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		262.612.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				11 Paket	189.750.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD & Masyarakat		0	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Ketepatan Penetapan Perda APBD	-		100 Persentase 55 Persentase Tepat Tepat/tidak tepat	7.383.054.988						-	16.832.119.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	-			6 Ranperda	153.044.226			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	1.870.472.000	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	13.402.164	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		14.471.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 Dokumen	86.642.062	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN BAGI HASIL PAJAK KENDARA AN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPRD & Masyarakat		1.633.856.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	53.000.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPA TAN BAGI HASIL PAJAK KENDARA AN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		222.145.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	-			5 Dokumen	173.801.740			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	799.067.000	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	34.924.300	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		181.459.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	34.636.380	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		181.008.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	34.882.732	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		74.628.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	34.579.948	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		180.788.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	34.778.380	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		181.184.000	SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	-			6 Dokumen	160.454.096			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifPenguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	225.581.000	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	36.528.165	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		25.990.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	23.577.165	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLOLAAN KEKAYANGAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		26.008.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	23.535.165	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLOLAAN KEKAYANGAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		26.066.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	23.581.165	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLOLAAN KEKAYANGAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif PD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPRD & Masyarakat		26.070.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					1 Dokumen	18.024.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat at		19.864.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah															
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	35.208.436	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat at		101.583.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	-				19 Dokumen	925.780.793			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat at	-	6.374.628.000	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD															
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					6 Dokumen	49.673.365	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat at		2.064.641.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli															
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					24 Orang	30.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifPD2 - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPRD & Masyarakat at		901.800.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi															

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	243.000.000	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		324.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD													
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	4.795.247	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		5.039.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				510 Dokumen	628.282.181	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		3.079.148.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Aspirasi Masyarakat	-		3 Dokumen	5.918.381.165			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	6.705.145.000	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	42.864.056	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		46.877.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	12.802.814	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		13.825.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	5.862.714.295	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		6.644.443.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	-			31 Dokumen	51.592.968			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat	-	857.226.000	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	6.489.795	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		809.311.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	7.999.114	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGLOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		8.145.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				8 Dokumen	31.686.813	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		34.464.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				9 Dokumen	5.417.246	Kab. Lombok Tengah, Praya Tengah, Jontlak	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	DPRD & Masyarakat		5.306.000	SEKRETARIAT DPRD	
	J U M L A H										44.148.206.018								62.150.004.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan program kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul pada saat Rencana Kerja dilaksanakan dan sebagai tolok ukur Akuntabilitas Kinerja, sehingga Rencana Kerja (Renja) harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaksana program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang meliputi:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Prioritas dan Skala Prioritas: Ketika ketersediaan anggaran terbatas, penting untuk menetapkan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Identifikasi program dan kegiatan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Skala prioritas dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada area yang paling penting dan mendesak.
- Revisi dan Penyesuaian: Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Evaluasi ulang program dan kegiatan yang direncanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengurangan atau penyesuaian yang dapat dilakukan tanpa mengorbankan tujuan utama. Fleksibilitas dan kreativitas dalam mengadaptasi rencana menjadi penting dalam situasi seperti ini.
- Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya: Dalam kondisi keterbatasan anggaran, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini meliputi peninjauan ulang dan penyesuaian alokasi anggaran, pengurangan biaya yang tidak penting atau efisiensi, serta pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal yang tersedia. Pemilihan strategi yang tepat dan pengaturan anggaran yang cermat dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut.
- Transparansi dan Komunikasi: Penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi yang jelas dengan pihak-pihak terkait. Informasikan secara terbuka tentang situasi anggaran yang ada, perubahan yang dilakukan, dan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, akan tercipta pemahaman dan kepercayaan dari semua pihak terkait.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah, terdapat beberapa kaidah atau prinsip pelaksanaan yang dapat menjadi panduan. Berikut ini adalah beberapa kaidah pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah:

- Kaidah Keterpaduan: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus terpadu dan sejalan dengan rencana kerja yang lebih tinggi, seperti RKPD dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini memastikan bahwa tujuan dan program kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan.
- Kaidah Partisipasi: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terkait, termasuk internal Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah, masyarakat, mitra kerja, dan sektor swasta. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi, pertemuan, diskusi, atau mekanisme lain yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan kontribusi.
- Kaidah Pengendalian: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus didukung dengan sistem pengendalian yang efektif. Pengendalian ini meliputi pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap capaian hasil, identifikasi permasalahan, dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan.
- Kaidah Akuntabilitas: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus dilakukan secara akuntabel. Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, memenuhi indikator kinerja, dan menggunakan anggaran dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang transparan, pelaporan yang jelas, dan pertanggungjawaban yang akurat harus diterapkan.
- Kaidah Keberlanjutan: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Keberlanjutan mencakup pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta perencanaan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keterkaitan antargenerasi.
- Kaidah Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi berarti melakukan penggunaan sumber daya secara optimal. Pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan penggunaan metode kerja yang tepat akan berkontribusi pada pencapaian hasil yang optimal.

- Kaidah Kesenambungan: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus memperhatikan kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, peningkatan kapasitas SDM, dan penyempurnaan rencana kerja berikutnya berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah meliputi langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tersebut. Rencana tindak lanjut ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan, termasuk alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, pengaturan tim kerja, dan strategi pelaksanaan.

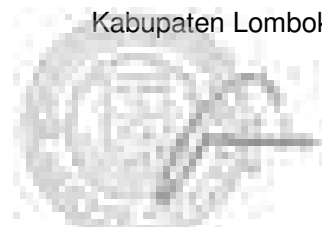
Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Bupati Lombok Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan yang akan datang agar dapat berhasil guna dan tepat guna sebagaimana sasaran yang diharapkan.

Praya, Oktober 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos, M.H.
NIP.197405151997031009